



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HAFIDZ BAYUAJI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**
3. NHK : **712065**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.780.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.310.000.000
2. Tanah Seluas 2124 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 752 m2/40 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 692 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah Seluas 1838 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **212.500.000**

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
4. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000



5. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000
6. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 71.905.258

F. HARTA LAINNYA Rp. 202.500.000

Sub Total Rp. 2.341.905.258

III. HUTANG Rp. 214.386.365

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.127.518.893

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.